



Mengawal Musrenbang, Memahami Kebutuhan Warga

RANGKAIAN pelaksanaan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menentukan skala prioritas pembangunan 2022 sedang berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Di DIY, tahapannya di tingkat kabupaten rata-rata sudah berakhir dan kini sedang berlanjut proses berikutnya yaitu musrenbang di tingkat kabupaten.

Musrenbang adalah satu metode *bottom-up* yang dimiliki Indonesia. Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan *bottom-up* ini. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan.

Identifikasi kebutuhan masyarakat dalam penganggaran adalah bentuk nyata dari *political will* pemerintah. Merupakan manifestasi kepedulian pemerintah terhadap sebuah masalah yang ada di masyarakat dan upaya untuk menyelesaikannya. Hal ini karena, keinginan baik dari pemerintah saja tidak akan cukup tanpa adanya dukungan anggaran. Tanpa dukungan anggaran, janji-janji politik pemerintah hanya akan menjadi wacana tanpa ada kepastian dalam pelaksanaannya. Karenanya menjadi sangat penting bisa menjamin bahwa janji-janji itu teridentifikasi dalam anggaran. Musrenbang adalah media penting untuk melakukan hal tersebut.

Sangat Penting

Inilah penjelasan mengapa forum Musrenbang itu menjadi sangat penting untuk bisa menjawab permasalahan di masyarakat. Forum ini diharapkan akan mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Skala prioritas yang disusun dalam forum ini seharusnya merupakan cermin seluruh kebutuhan masyarakat, bukan hanya mem-

Ane Permatasari

otret secara parsial kebutuhan tersebut.

Permasalahan inilah yang sering muncul dalam proses Musrenbang. Potret kebutuhan yang mampu dibingkai melalui kegiatan ini biasanya hanyalah permasalahan-permasalahan fisik yang solusinya biasanya merupakan pembangunan infrastruktur kasat mata. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang bersifat non-fisik sering luput dari perhatian. Kalaupun di masa pandemi ini pemberdayaan masyarakat menjadi isu seksi yang mulai mendapat perhatian, di banyak wilayah mayoritas didominasi isu pemberdayaan UMKM. Sektor ini memang terbukti menjadi penyelamat ekonomi produktif. Karena telah membuktikan diri mampu bertahan di tengah gelombang deras pandemi yang meluluhlantakkan begitu banyak kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan masalah perlindungan perempuan dan anak, pelayanan kelompok difabel, sering tidak mendapatkan perhatian.

Permasalahan lain adalah forum musrenbang sering belum mampu menghadirkan semua unsur masyarakat, misalnya perempuan, anak dan kelompok difabel. Sering mereka tidak diundang. Kadang mereka diundang, tapi karena waktu pelaksanaan musrenbang di desa biasanya malam hari, menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk hadir. Terakhir adalah fenomena bahwa mereka diundang, bisa hadir dan diberi kesempatan bicara, tetapi ketika bicara, yang dilakukannya malah curhat berbagai masalah yang dihadapi, tanpa menyampaikan data sama sekali.

Kelemahan

Di sinilah kelemahan yang sering dimiliki kelompok ini. Berkeluh kesah memang perlu de-

ngan harapan bisa menumbuhkan empati pihak lain yang mendengarkan. Tetapi membuat sebuah permasalahan menjadi sebuah mata anggaran yang dianggarkan, harus didukung data yang menunjukkan, penyelesaian masalah itu membutuhkan dana dan perlu dibiayai melalui APBDes atau APBD. Di sinilah para perempuan, kelompok difabel dan para pemerhati masalah anak, harus lebih mempersiapkan diri dengan data ketika menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka di dalam musrenbang.

Kegiatan musrenbang tingkat kabupaten masih berproses di tahap revisi susunan daftar prioritas yang akan dibayai tahun 2022 sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Masih ada waktu untuk mencermati lagi draft susunan prioritas tersebut untuk bisa menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat akan terakomodir optimal. Mari kita kawal proses musrenbang. Sehingga mampu memberikan hasil terbaik bagi seluruh rakyat. □

*)Dr Ane Permatasari MA, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005